

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan pendidikan di Indonesia mulai menunjukkan langkah maju ketika penguasaan Hindia Belanda di Indonesia mulai mengalami perubahan, perubahan yang dimaksud adalah perubahan pada kebijakan yang menekankan pada kesejahteraan bangsa Indonesia berada di masa awal abad ke-20. Hal ini dipicu oleh adopsi kebijakan yang dikenal dengan sebutan "Politik Etis"<sup>1</sup> atau juga terkenal dengan sebutan "Politik Balas Budi" oleh pihak pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Kebijakan ini diterapkan dengan dasar keyakinan bahwa pemerintah kolonial memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi sebagai wujud penghargaan atas kontribusi mereka.<sup>2</sup> Penerapan Politik Etis ini secara resmi diawali setelah Ratu Wilhelmina dari Belanda memberikan pidato tahunannya pada bulan September 1901. Kebijakan Politik Etis membawa tiga program utama, termasuk pengembangan

---

<sup>1</sup> Politik Etis adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mensejahterahkan rakyat Indonesia sebagai tanggung jawab dari eksploitasi pemerintah Hindia Belanda kepada rakyat Indonesia dengan perhatian utamanya ialah, pendidikan. Lihat dalam Adi Kurniawan, Anindya Prameswari, dan Yustina Sri Ekwandari, "Irigasi Dan Pendidikan Politik Etis Di Kota Metro" 6, no. 2 (2022): 40–47.



M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Cetakan ke-1  
er 2008 (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta Anggota IKAPI, 2008), Hlm

sistem irigasi, transmigrasi penduduk, dan peningkatan pendidikan, pada masa tersebut, pendidikan menjadi pusat perhatian utama.<sup>3</sup>

Pendidikan di kota Makassar mulai direncanakan pembangunan perguruan tinggi pada tahun 1951, akan tetapi sebetulnya sudah dimulai pada masa NIT tahun 1947 mulai membangun Universitas Indonesia cabang Makassar.<sup>4</sup> Sejak tahun 1947, sebuah Fakultas Ekonomi dibuka. Awalnya, pada tanggal 23 Juli, fakultas ini berdiri di Lorong 107, Kampung Baraya. Seiring berjalannya waktu, fakultas ini berkembang dengan pesat. Pada bulan Oktober 1948, jumlah mahasiswa yang mendaftar telah mencapai 36 orang, dan terdapat 11 orang dosen yang mengajar. Setahun berikutnya, pada Oktober 1949, jumlah mahasiswa yang bergabung terus bertambah hingga mencapai 77 orang.<sup>5</sup>

Memasuki bulan April tahun 1950 pada saat yang sama Makassar menghadapi situasi keamanan yang tidak stabil akibat munculnya Gerakan Andi Aziz seorang Kapten dari pasukan KNIL di Sulawesi Selatan bernama Andi Aziz, ia memimpin sekitar 300 anggota pasukannya dalam menyerang barak militer yang

---

<sup>3</sup> Agus Susilo dan Isbandiyah Isbandiyah, "Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia," *Historia Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 6, no. 2 (7 September 2018): Hlm 5.

<sup>4</sup> Ilham Daeng Makkelo, "Penataan Kota Dan Masyarakat Perkotaan: Makassar Sebagai Ibukota Negara Indonesia Timur (NIT) 1946-1950," *Sasdaya: Gadjah Mada Journal of Humanities* 2, no. 1 (18 April 2019): Hlm 282.



urita Pawiloy, Intan Densi Kamar, dan Rauf A. Rahim, *Sejarah Pendidikan Sulawesi Selatan*, ed. oleh Mardanas Safwan dan Sutrisno Kutoyo (Ujung Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi Dan itasi Kebudayaan daerah, 1980), Hlm 119.

ditempati oleh CPM (Corps Polisi Miter) beserta Mess TNI. Serangan ini merupakan sebuah protes terhadap pengiriman satu batalyon Worang yang merupakan pasukan TNI ke Sulawesi Selatan.<sup>6</sup> Selain itu, pertentangan antara satuan Tentara dan Kahar Muzakkar dan menyatakan bergabungnya Kahar Muzakkar dalam Gerakan Karto Suwiryo DI/TII pada bulan Januari 1952 pada saat yang sama Kahar Muzakkar memulai masuk kedalam hutan dan melancarkan pemberontakan.<sup>7</sup>

Pada saat kondisi keamanan di Makassar tidak stabil, situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran yang besar, terutama di kalangan dosen yang mengajar di sana. Ketidakstabilan ini telah memberikan tekanan besar pada mereka, membuat banyak dosen merasa was-was akan keamanan mereka sendiri. Kekhawatiran semacam ini pada akhirnya mendorong sejumlah dosen untuk meninggalkan Makassar dan menyebabkan kekosongan dalam tenaga pengajar di kota Makassar. Dampaknya pada fakultas yang baru saja didirikan pada tahun 1947 terpaksa harus menghadapi situasi sulit. Kekosongan tenaga pengajar yang signifikan akibat perasaan tak aman di Makassar memaksa fakultas untuk mengambil keputusan

---

<sup>6</sup> Bahtiar, Ansaar, dan Sritimuryati, "Peristiwa Andi Azis Di Sulawesi Selatan 5 April 1950 (Andi Azis Events In South Sulawesi 5 April 1950)," *International Seminar on Conflict and Violence, Seminar Series in Humanities and Social Sciences* 1 (2019): Hlm 10.



urul Azizah, "Islamisme: Ideologi Gerakan Kahar Mudzakkar di Sulawesi 1952-1965," *Jurnal Penelitian Keislaman* 15, no. 2 (22 Januari 2020): Hlm

yang sulit. Operasional fakultas pun terhenti karena keterbatasan dosen yang bersedia untuk tinggal dan mengajar di situasi yang tidak aman.<sup>8</sup>

Memasuki tahun 1951 sudah ada jejak pendirian perguruan tinggi di Makassar seperti munculnya Universitas Sawerigading, dilanjutkan lagi pendirian UMI tahun 1954, kemudian UNHAS tahun 1956 dan IAN yang kita kenal sekarang adalah UIN, kemudian pada periode 1960-1965 seperti pendirian perguruan tinggi IKIP yang akan kita kenal sekarang UNM.<sup>9</sup>

Pendirian Universitas Sawerigading di Makassar dimulai pada tahun 1951 didirikan oleh Nuruddin Sjahadat, Drs. G.J. Wolhoff, dan Mr. Tjia Kok Tjiang.<sup>10</sup> Proses persiapan mendirikan Universitas Sawerigading menghasilkan pencapaian yang signifikan, yang kemudian pada bulan September tahun 1952, Universitas Sawerigading memulai pelaksanaan kegiatan perkuliahan dengan menyelenggarakan kursus Notariat, kursus Akte B-1, Tata Negara, serta bidang Ekonomi dan Ilmu Dagang.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, dan Heri Kusuma Tarupay, *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an*, ed. oleh Setyawibawa (Yogyakarta: PT Kansisus, 2014), Hlm 18.

<sup>9</sup> Anna Asriani Muchlis, "Bertahan Di Tengah Krisis: Pendirian Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, 1945-1965," *Lensa Budaya*, Edisi Khusus Persembahan Untuk Edward L Poelinggomang, 12, no. No.2 (2017): Hlm 30, <https://doi.org/10.34050/jlb.v12i2>.



<sup>10</sup> Jariff Saleh, *Memperkenalkan Sulawesi* (Makassar: Djawatan Penerangan Sulawesi, 1955), Hlm 295.

Kementrian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Sulawesi* (Jakarta: an Penerangan, 1953), Hlm 487.

Universitas Sawerigading dibawah kepemimpinan Nuruddin Syahadat, mengalami pertumbuhan yang pesat di bawah kepemimpinannya. Dalam menjabat sebagai presiden universitas tersebut, tidak hanya terjadi perkembangan di Makassar saja, namun Universitas Sawerigading juga berhasil merambah ke wilayah luar pulau Sulawesi khususnya di pulau Jawa.<sup>12</sup> Melalui, Nuruddin Syahadat berhasil membuka cabang Universitas Sawerigading di Pulau Jawa, tak hanya itu terbentuknya Universitas Sawerigading cabang Semarang yang seiring berjalannya waktu, menjadi cikal bakal dari apa yang sekarang dikenal sebagai Universitas Semarang.<sup>13</sup> Transformasi ini mencerminkan perubahan yang besar oleh Universitas Sawerigading di masa lalu.

Pada periode tahun 1965 - 1980 Universitas Sawerigading mulai mengalami masa kemunduran setelah pendiriannya di tahun 1951 yang dimana Universitas Sawerigading baru mulai membuat akte Yayasan Universitas Sawerigading nomor 4 di tahun 1966 barulah disitu Universitas mempunyai legalitas resmi mendapatkan pengakuan secara hukum keberadaan Universitas Sawerigading.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> “Sejarah UNSA Makassar,” <https://unsamakassar.ac.id/> (blog), diakses 8 November 2023, <https://unsamakassar.ac.id/tentang-unsal/>.

<sup>13</sup> Hamid Abdullah, *Dari Universitas Semarang Ke Universitas Diponegoro Studi Kasus Tentang Sejarah Kelahiran Universitas*, Cetakan II (Semarang: Badan Penyelenggara Universitas Diponegoro Semarang, 1986), Hlm 4, [ints.undip.ac.id/1752/](https://ints.undip.ac.id/1752/).

Sitskelimowa, SH., “Akte Notaris Yayasan Perguruan Sawerigading Tahun 1966,”.



Tak Hanya itu beberapa masalah mulai muncul setelah kunjungan menteri PTIP ke Makassar pada tahun 1964 kemudian setelahnya adanya kebijakan pemerintah untuk menaungi Perguruan Tinggi Swasta pada tahun 1966, dua tahun setelahnya pada 1968 tercatat bahwa dalam Arsip Pemerintah Kota Madya Ujung Pandang, di mana pemerintah belum sepenuhnya mengakui eksistensi Universitas Sawerigading. Meskipun demikian, di sisi lain, terdapat pengakuan terhadap Universitas Sawerigading yang diakui sebagai lembaga pendidikan yang berjasa dan menjadi salah satu yang tertua di Kota Makassar kemudian ini menjadi awal kemuduran Universitas Sawerigading di Makassar.

Universitas Sawerigading tersebut mengalami kemuduran semenjak itu lembaga ini telah resmi tidak diakui oleh pemerintah Kota Makassar ijazahnya tidak berlaku kemudian Universitas ini menjadi mati karena tidak adanya kegiatan kampus yang berjalan dan kefakuman ini cukup lama. Hingga masuk pada periode tahun 1980-an tepatnya 1984 mulai ada usaha untuk mengakui Universitas Sawerigading kepada Pemerintah Kota Makassar.<sup>15</sup>

Berdasarkan data di atas maka penulis akan membahas lebih jauh dan mendalam mengenai awal mula berdirinya Universitas Sawerigading serta perkembangannya, juga menjadi titik penting penelitian ini adalah pengakuan pemerintah atas Universitas Sawerigading yang baru diakui pada tahun 1989. Maka dari itu, penelitian ini penting dan menjadi pusat perhatian karena dalam latar



---

Hasil Wawancara bersama Bapak Drs. Umar Kamaruddin, M.Si. Pada 14 Januari 2024. Umur 67 tahun bertugas sebagai salah satu Pengurus Universitas Sawerigading.

belakang peneliti bertanya-tanya mengapa pendirian Universitas Sawerigading mengalami hambatan setelah tahun 1964, padahal Universitas Sawerigading itu dan secara resmi tidak diakui oleh pemerintah pada tahun 1968. Namun, setelah itu, universitas mengalami masa kevakuman yang panjang. Kemudian mulai dari tahun 1984, upaya dilakukan untuk menghidupkan kembali universitas tersebut. Penelitian ini menyoroti fase-fase kritis dalam sejarah Universitas Sawerigading, menekankan tantangan yang dihadapi dan upaya untuk membangun kembali momentum Universitas Sawerigading di Kota Makassar. dan disusunlah judul penelitian **Perkembangan Universitas Sawerigading: Universitas Pertama Di Makassar Tahun 1951-1999.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Selain mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas, dalam rangka melakukan penelitian, perumusan masalah juga merupakan tahap penting. Langkah ini dilakukan untuk membantu sejarawan dalam menemukan sumber-sumber yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian mereka. Oleh karena itu, langkah pertama adalah merumuskan pernyataan masalah yang akan diinvestigasi dalam penelitian ini, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah berdirinya Universitas Sawerigading ?
2. Mengapa pemerintah baru mengakui pendiriannya pada tahun 1989 ?

## 1.3 Batasan Masalah



### 3.1 Batasan Spasial

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan menjaga agar penelitian ini tetap terfokus dan tidak meluas, maka kajian dalam skripsi ini akan dibatasi pada wilayah Universitas Sawerigading yang berlokasi di Jalan Kande No. 127, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.

Hal yang menarik dari Universitas Sawerigading sebagai objek penelitian adalah statusnya sebagai salah satu universitas tertua di Makassar, bahkan berdiri sebelum Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan Universitas Muslim Indonesia (UMI). Fokus penelitian ini akan menyoroti proses berdirinya Universitas Sawerigading, dinamika yang terjadi pada awal pendiriannya, serta fase-fase perkembangan, kemunduran, kevakuman, hingga kebangkitan kembali universitas ini.

### **1.3.2 Batasan Temporal**

Untuk menjaga agar penelitian ini tetap fokus, batasan temporal yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode dari tahun 1951 hingga 1999. Pemilihan awal periode pada tahun 1951 didasarkan pada temuan arsip yang menunjukkan bahwa Universitas Sawerigading didirikan pada tahun tersebut oleh Nurdin Syahadat, Drs. G.J Wolhoff, dan Mr. Tjia Kok Tijang. Pada masa awal pendiriannya, Universitas Sawerigading menghadapi pertentangan dengan Gubernur Sudiro, namun konflik ini berhasil diselesaikan oleh Gubernur tersebut.



ain itu, Universitas Sawerigading mengalami perkembangan signifikan, pada periode 1956-1965 ketika cabang-cabang Universitas Sawerigading

ini berdiri di Jawa. Namun, pada tahun 1968, Universitas Sawerigading mulai mengalami kemunduran dan kevakuman akibat perubahan kebijakan pemerintah terkait perguruan tinggi swasta. Meskipun demikian, masa kevakuman ini tidak berlangsung lama. Penulis memilih tahun 1999 sebagai akhir periode penelitian karena pada masa itu, Universitas Sawerigading mulai menunjukkan perkembangan, terutama setelah upaya pengakuan universitas yang dimulai sejak tahun 1989.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sejarah berdirinya Universitas Sawerigading
2. Untuk mengetahui sebab mengapa pemerintah baru mengakui pendirian Universitas Sawerigading pada tahun 1984.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi sumber referensi yang berharga bagi para penulis dan peneliti yang tertarik untuk mengeksplorasi aspek-aspek sejarah perguruan tinggi, terutama dalam konteks Universitas Sawerigading di Makassar. Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai landasan pertama yang berguna dan panduan bagi penelitian yang akan datang dalam jangka waktu mendatang. Kemudian penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar sejarah

in.



##### **Manfaat Praktis**

Penelitian ini memberikan manfaat praktis yang berarti dalam hal :

1. Menambah koleksi pengetahuan tentang sejarah pendidikan di Indonesia dan Sulawesi Selatan, dengan fokus pada perguruan tinggi di Makassar. Penelitian ini membantu kita memahami bagaimana pendidikan di Indonesia, khususnya di Makassar, telah berubah dan berkembang seiring waktu.
2. Mengenalkan Perguruan Tinggi Sawerigading dan perannya dalam pendidikan tinggi di Makassar kepada khalayak yang lebih luas. Ini mungkin dapat mendorong minat terhadap perguruan tinggi ini dan menghubungkan alumni dan komunitasnya.

## 1.6 Tinjauan Pustaka

### 1.6.1 Penelitian Yang Relevan

Mardanas Safwan dan diedit oleh Sutrisno Kutoyo.<sup>16</sup> Dalam tulisannya "Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan" terbit pada tahun 1981 yang membahas dengan mendalam perjalanan pendidikan di Sulawesi Selatan, yang memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Salah satu aspek yang ditekankan hanya menggambarkan dari pendidikan tradisional hingga pendidikan kolonial, pendidikan pada awal abad ke-20 hingga 1945, pendidikan di Masa Pendudukan Jepang (1942-1945), pendidikan di masa pasca kemerdekaan hingga perkembangan sekolah menengah. Kemudian



---

'awiloy, Densi Kamar, dan Rahim, *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi*  
*Op. Cit.*

buku ini juga membahas mengenai pendidikan di Sulawesi Selatan, dari daerah Mandar, Sengkang (Wajo), Palopo (Luwu), Bone, dan Makassar. Sedangkan sejarah Universitas Sawerigading masih sangat sedikit dijelaskan dalam pembahasannya. Buku ini menjadi buku dasar bagi penulis dalam memahami perkembangan pendidikan di Sulawesi Selatan.

Buku kedua yaitu "Memperkenalkan Sulawesi" yang diterbitkan oleh Djawatan Penerangan Propinsi Sulawesi<sup>17</sup> adalah sebuah sumber informasi yang sangat berharga tentang sejarah, budaya, dan perkembangan wilayah Sulawesi. Bab 3 dari buku ini secara khusus memberikan pandangan mendalam dan mendetail tentang perkembangan Perguruan Tinggi di Makassar, yang merupakan salah satu aspek penting yang berkaitan dengan penelitian ini dalam konteks sejarah pendidikan di Makassar. Dalam bab ini, pada menggambarkan perjalanan pendidikan tinggi di Makassar, serta peran penting beberapa institusi pendidikan tinggi. Salah satu institusi yang ditekankan adalah Balai Perguruan Tinggi Sawerigading, yang memiliki sejarah yang panjang dan berperan besar dalam perkembangan pendidikan tinggi di Sulawesi Selatan. Buku ini dengan seksama mengulas asal-usul, perkembangan, dan kontribusi perguruan tinggi ini dalam mengangkat standar pendidikan di daerah tersebut. Selain itu, juga membahas peran Universitas Hasanuddin dan Universitas Muslim Indonesia dalam transformasi pendidikan tinggi di Makassar dan ini menjadi sebuah sumber informasi yang bagi penulis yang ingin memahami bagaimana pendidikan tinggi telah berkembang.



---

oleh, *Memperkenalkan Sulawesi, Op.Cit.*

Buku ketiga yang ditulis oleh Sarkawi B. Husain<sup>18</sup> yang diterbitkan pada tahun 2015 berjudul “Sejarah Sekolah Makassar di Tengah Kolonialisme, Pertumbuhan Pers, dan Pembentukan Elite Baru. Makassar” penerbit Inninawa. Buku ini menyajikan informasi mengenai sejarah pendidikan di kota Makassar, dengan melihat Makassar telah memiliki sistem pendidikan yang telah berkembang yang dimulai dari sistem tradisional hingga terjadi perubahan yang ditandai dengan masuknya masa kolonial akhir abad ke-19 sampai abad ke-20. Yang perlu digaris bawahi adalah buku ini sangat membantu dalam penulisan dengan melihat konteks yang beragam pada perkembangan sistem pendidikan di masa sebelum datangnya kolonial dan pasca kolonial serta erat kaitannya dengan lahirnya elit-elit baru yang memberikan suatu usaha dalam membangun pendidikan khususnya di Makassar walaupun itu, bukan dari kalangan bangsawan.

Buku yang telah disebutkan di atas memberikan pandangan yang sangat berharga dalam pemahaman tentang sejarah Universitas Sawerigading dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya. Namun, penting juga untuk melihat buku lain yang berbicara tentang asal-usul Universitas Semarang, yang kemudian menjadi Universitas Diponegoro. Dalam karya Hamid Abdullah<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sarkawi B. Husain, *Sejarah Sekolah Makassar Di Tengah Kolonialisme, Pertumbuhan Pers, dan Pembentukan Elite Baru (Periode 1876-1942)*, Cetakan Pertama (Makassar: Inninawa, 2015).

<sup>19</sup> Hamid Abdullah, *Dari Universitas Semarang Ke Universitas Diponegoro Studi tentang Sejarah Kelahiran Universitas*, Op.Cit.



ini mengungkap bagaimana peran masyarakat Semarang sangat penting dalam usaha mereka untuk meningkatkan pendidikan tinggi di Jawa Tengah. Dalam buku tersebut, kita dapat menemukan bagaimana komunitas mahasiswa memainkan peran yang signifikan dalam pertumbuhan universitas ini. Namun, dalam perjalanannya, buku ini juga sejenak menyentuh sejarah Universitas Sawerigading di Semarang. Pada tahun 1956, universitas ini mengalami kemunduran karena protes mahasiswa yang merasa kecewa dengan administrasi universitas. Kemunduran ini berlanjut ke tahun 1957, hingga akhirnya Universitas Sawerigading terpaksa berhenti beroperasi. Kejadian ini ternyata menjadi titik awal munculnya Universitas Semarang di masa yang akan datang.

Buku ini sangat relevan dalam mengkaji tentang "Nurdin Syahadat dan Universitas Sawerigading 1951-1965." Alasan utamanya adalah buku ini mencakup informasi mengenai Universitas Sawerigading yang merupakan elemen kunci dalam sejarah perguruan tinggi di Indonesia. Seperti yang dinyatakan dalam buku, pembangunan Universitas Sawerigading di Makassar memiliki dampak yang besar, bahkan sampai ke Jawa, di mana ini menjadi awal berdirinya Universitas Semarang. Dengan konteks ini, Anda akan lebih memahami dan menjelaskan sejarah dinamika Universitas Sawerigading di Makassar, serta hubungannya dengan perkembangan perguruan tinggi di Jawa.



Anna Asriani Muchlis<sup>20</sup> dalam tulisannya "Kampus Hijau Di Tengah Perubahan Zaman: Universitas Muslim Indonesia 1954-1965 tahun 2013" mengulas pendirian Universitas Muslim Indonesia di Kota Makassar. Universitas ini berdiri pada tahun 1954 dari inisiatif masyarakat kaum elite dengan latar belakang etnis yang beragam, menjadi suatu pergerakan yang mencerminkan semangat perubahan pada pendirian suatu Universitas. Penelitian Anna Asriani Muchlis sangat relevan untuk memahami perkembangan perguruan tinggi swasta di Makassar. Meskipun fokusnya pada Universitas Muslim Indonesia sehingga tulisannya memberikan gambaran kontekstual yang penting pada proses perjuangan organisasi-organisasi partai islam untuk membangun kesadaran tentang pendidikan berbasis Islam. Walaupun demikian sebagian besar penelitiannya tidak membahas tentang Universitas Sawerigading, tapi penulis dapat memahami konteks dari Universitas Muslim Indonesia.

Selanjutnya, Amrullah Amir<sup>21</sup> pernah menulis tentang "Sejarah Berdirinya Universitas Hasanuddin," dan melalui tulisannya, kita dapat melihat akar dari pendirian Universitas Hasanuddin. Universitas ini bukanlah hasil yang instan, tetapi tumbuh dari pendirian beberapa fakultas di Makassar. Perjalanan dimulai dengan berdirinya fakultas ekonomi, hukum, dan kedokteran. Puncak dari perjalanan ini

---

<sup>20</sup> Anna Asriani Muchlis, "Kampus Hijau Di Tengah Perubahan Zaman : Universitas Muslim Indonesia 1954-1965" (Skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2013), (Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya).



Amrullah Amir, *Sejarah Berdirinya Universitas Hasanuddin*, Cetakan 1, alis Universitas Hasanuddin (Makassar: Innawa bekerjasama dengan Kedokteran Universitas Hasanuddin, 2021).

adalah resmi didirikannya Universitas Hasanuddin pada tahun 1954. Keberhasilan ini mencerminkan tekad dan keinginan kuat masyarakat Makassar untuk memiliki sebuah universitas negeri yang lengkap. Ini adalah cermin dari besarnya minat dan hasrat warga di daerah ini untuk berkontribusi dalam pembangunan, khususnya di bidang pendidikan tinggi.

Walaupun tulisannya lebih menekankan pada perjalanan Universitas Hasanuddin, Amrullah Amir juga memberikan sebagian kecil informasi tentang Universitas Sawerigading. Meskipun tidak mendalam, informasi ini menambahkan dimensi baru, menggambarkan keragaman dan dinamika perkembangan pendidikan tinggi di Makassar pada waktu itu yang menunjukkan betapa kompleksnya perjalanan universitas dan sejauh mana minat masyarakat pada masa itu terhadap pendidikan.

### **1.6.2 Landasan Konseptual**

Dalam rangka memahami penelitian ini maka, penulis membuat landasan konseptual sebagai rujukan/dasar bagi penulis untuk memberikan pemahaman tentang yang dikaji sebagai berikut :

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi<sup>22</sup>. Universitas merupakan salah satu bentuk dari perguruan tinggi yang berwenang menyelenggarakan pendidikan akademik atau vokasi dalam berbagai disiplin ilmu. Selain itu, universitas juga memiliki hak untuk mengadakan



---

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang an Tinggi., Hlm 42.

penelitian serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Universitas biasanya terdiri atas sejumlah fakultas yang mencakup berbagai bidang ilmu, seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, dan teknologi.

Dengan demikian, universitas merupakan bentuk perguruan tinggi yang memiliki cakupan ilmu pengetahuan paling luas dibandingkan jenis perguruan tinggi lainnya. Institusi ini tidak hanya berfokus pada satu cabang ilmu, tetapi mencakup berbagai rumpun ilmu yang berbeda, memungkinkan pengembangan pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu.

Menurut UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti),<sup>23</sup> atau Perguruan Tinggi merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan Tinggi diselenggarakan oleh satuan pendidikan perguruan tinggi yang mendidik lulusan pendidikan menengah atas, baik Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan UU Dikti, bentuk perguruan tinggi terdiri atas, akademi, sekolah tinggi, politeknik, institut, dan universitas.

Perguruan Tinggi terbagi menjadi dua kategori utama, yang pertama adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berada di bawah naungan pemerintah, dan yang kedua adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang dikelola oleh masyarakat



---

Wito Edy Priandono dan Hadaiq Sanabila Rolis, *Puspawarna Pendidikan Indonesia*, Cetakan 1 (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Publik Indonesia, 2016), Hlm 30.

atau pihak swasta. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah lembaga pendidikan tinggi yang didirikan dan dikelola oleh badan hukum atau individu dari pihak swasta, bukan oleh pemerintah. PTS berfungsi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu dan program studi.<sup>24</sup>

Salah satu contoh bagi penelitian ini adalah Universitas Sawerigading yang merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan oleh Nurdin Syahadat. Universitas ini dikenal sebagai universitas pertama dan tertua di Makassar karena didirikan pada tahun 1951, menjadikannya sebagai pelopor dalam pengembangan pendidikan tinggi di Makassar.

Makassar, dalam tulisan ini, merujuk pada bagian kota yang dahulu dikenal Kotapraja /Kotamadya daerah Tingkat II Ujung pandang yang kemudian menjadi sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan Kota Makassar. Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, terdapat tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai, yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi., Hlm 8.



Lumu' Taris dan H Jufri, "Implementasi Open Government Dan Peran Masyarakat Dalam Pelayanan Prima Berbasis Kecamatan Di Kota Makassar;" *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar* 1 (2017).

Kota Makassar juga berbatasan dengan beberapa daerah lainnya: Kabupaten Maros di sebelah utara, Kabupaten Gowa di sebelah selatan, Selat Makassar di sebelah barat, serta Kabupaten Maros di sebelah timur.

## 1.7 Metode Penelitian

Dalam Penulisan karya penulisan sejarah diperlukan penerapan metode sejarah. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mempermudah penulisan karya sejarah secara ilmiah. Dalam rangka penulisan karya ilmiah ini, penulis memakai metode kerja diantaranya pengumpulan data yang berhubungan dengan topik penelitian.<sup>26</sup> Dengan berpedoman pada metode sejarah maka penyusunan penelitian ini melalui tahapan-tahapan yaitu pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi, interpretasi dan penulisan (historiografi).

### 1. Pengumpulan Sumber Sejarah

Tahap heuristik dalam pengumpulan sumber merupakan langkah awal yang sangat penting dalam penulisan sejarah. Keberhasilan dalam menelusuri jejak peristiwa masa lampau sangat bergantung pada keahlian dan kejelian penulis sejarah dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber yang relevan. Tanpa sumber yang memadai, proses penulisan sejarah akan mengalami kendala yang signifikan.<sup>27</sup>



---

Suntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013),

oko Sayono, “Langkah-Langkah Heuristik Dalam Metode Sejarah Di Era *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 15, no.

Dalam upaya mencari sumber sejarah, penulis umumnya mengkategorikan sumber tersebut menjadi dua jenis utama, yaitu Sumber Primer dan Sumber Sekunder. Sumber Primer merujuk kepada dokumen asli yang secara langsung terkait dengan yang ingin diteliti oleh penulis dalam hal ini Universitas Sawerigading. Penulis berhasil menemukan beberapa Sumber Primer yang sangat bernilai, di antaranya adalah dokumen arsip berupa, Akte Notaris Yayasan Universitas Sawerigading Tahun 1966 Akte Notaris Yayasan Universitas Sawerigading Tahun 1984, Akte Notaris Yayasan Universitas Sawerigading Tahun 1993 Surat Keputusan Kementerian dan Kebudayaan tentang Pemberian Status Universitas Sawerigading Tahun 1989, Arsip Pemerintah Kota Madya Ujung Pandang 1926-1988. No. reg 1637:Surat Walikota Madya Ujung Pandang tentang Status Universitas Sawerigading Tahun 1968 Dokumen-dokumen tersebut. Selain mengandalkan sumber tertulis, penulis juga melibatkan penggunaan dokumentasi dalam proses pengumpulan sumber sejarah. Dengan mendapatkan izin dari bagian Humas Universitas Sawerigading, Bapak Kamaruddin, S.Sos, penulis berhasil mengumpulkan sejumlah arsip berupa foto-foto yang memberikan penggambaran sejarah Universitas Sawerigading. Beberapa foto yang berhasil dikumpulkan antara lain: Foto Pendiri Universitas Sawerigading bersama keluarga, Foto Kartu Mahasiswa Universitas Sawerigading pusat Makassar Tahun 1957, Foto Suasana Kampus Sawerigading Makassar, Dokumentasi berupa foto ini memberikan kesan Universitas Sawerigading dari sudut pandang yang berbeda.



---

sumber 2021): Hlm 371, <https://doi.org/10.17977/um020v15i22021p369->

Selain itu juga, penulis juga berhasil mengakses sumber sekunder yang memberikan wawasan lebih lanjut, yaitu Buku Alumni Universitas Sawerigading tahun 1998. Sebagian besar dokumen ini ditemukan oleh penulis selama melakukan izin penelitian di Kampus Sawerigading Makassar, yang terletak di Jalan Kandeia Kelurahan Bontoala Kecamatan Bontoala. Sementara sebagian foto dan arsip lainnya berhasil didapatkan melalui kunjungan penulis ke Kantor Arsip Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan melibatkan sumber dokumentasi dan foto, penulis mampu menyajikan informasi sejarah yang lebih lengkap mengenai Universitas Sawerigading.

Guna menyempurnakan pengumpulan sumber sejarah yang menyeluruh, penulis memakai pendekatan sejarah lisan melalui<sup>28</sup> metode wawancara. Dalam upaya ini, penulis telah melaksanakan serangkaian wawancara dengan Pengurus Yayasan Sawerigading dengan mewawancarai Pengurus Yayasan Sawerigading menjadi kunci untuk memperluas aspek-aspek sejarah yang tidak terdokumentasikan secara tertulis.

## 2. Verifikasi

Pada langkah ini, peneliti melakukan proses seleksi dan penentuan sumber-sumber yang akan digunakan sebagai materi penelitian, serta menentukan mana yang dapat diterima sebagai referensi dan mana yang harus dikesampingkan. Dalam



---

Sejarah lisan merupakan sebuah metode untuk menggali pengalaman dari orang-orang yang tidak dapat mengatasi keterbatasan dokumen-dokumen tertulis yang tidak selalu ada. Erwiza Erman, "Penggunaan Sejarah Lisan Dalam Penelitian Sejarah di Indonesia," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 13, no. 1 (2011): Hlm 8.

penggunaan sumber sejarah, penting bagi peneliti untuk memberikan perhatian khusus pada keaslian atau otentisitas sumber tersebut. Proses verifikasi terhadap sumber-sumber sejarah ini melibatkan dua aspek penting, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Dalam konteks ini, peneliti melakukan seleksi ketat terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan untuk memastikan keasliannya dan relevansinya dengan fokus penelitian terkait dengan Perguruan Tinggi Sawerigading.

### 3. Interpretasi

Proses interpretasi atau penafsiran terhadap data. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul akan dibandingkan dan dianalisis secara mendalam untuk kemudian disimpulkan. Hal ini bertujuan untuk memahami data dengan lebih baik, menemukan kausalitas, dan menjelaskan relevansinya dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, penulis melakukan analisis yang cermat terhadap berbagai sumber data yang diperoleh, baik yang bersifat primer maupun sekunder, terkait dengan Universitas Sawerigading. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menyimpulkan temuan-temuan yang relevan dengan fokus penelitian yang sedang dijalankan.

### 4. Penulisan (Historiografi)

Setelah proses pengumpulan sumber, verifikasi, dan interpretasi selesai, tahapan selanjutnya adalah tahap penulisan, yang sering disebut sebagai historiografi. Pada tahap historiografi ini, dilakukan upaya untuk merekonstruksi kembali dengan tujuan memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang



telah diidentifikasi. Historiografi merupakan kelanjutan dari proses interpretasi, di mana hasil-hasil analisis dikonversi menjadi narasi yang menggambarkan peristiwa yang terjadi seiring dengan rekonstruksi fakta-fakta sejarah yang telah dikumpulkan. Hasil dari tahap historiografi ini akhirnya dibentuk menjadi karya ilmiah yang mengulas tentang Perguruan Tinggi Sawerigading dalam konteks kesejarahannya pada periode tahun 1951-1965.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu diadakan susunan pembahasan yang diuraikan dalam susunan bagian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan Pada bab ini membahas latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Pada sub latar belakang menjelaskan secara umum sejarah pendidikan di Makassar dan awal mula berdirinya Universitas di Makassar hingga fenomena dari Universitas Sawerigading.

Bab II : bab ini akan membahas mengenai perkembangan pendidikan di Makassar yang dimulai dari masa Kolonial, masa Jepang, Masa Kemerdekaan

Bab III : bab ini akan membahas mengenai sejarah berdirinya Universitas Sawerigading



Bab IV : bab ini akan membahas mengenai sebab atau faktor yang menjadi alasan mengapa pemerintah baru mengakui pendirian Universitas Sawerigading pada tahun 1989.

Bab V : Kesimpulan Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan berisi saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.



## BAB II

### PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR

Pada awal abad ke-20, sistem pendidikan di Hindia-Belanda mengalami perubahan signifikan sebagai hasil dari kebijakan Politik Etis. Kebijakan ini berhasil menciptakan suatu sistem pendidikan yang mencakup masyarakat pribumi, mulai dari sekolah dasar di desa hingga tingkat universitas. Pemerintah Hindia-Belanda, didorong oleh berbagai pihak, baik dari Belanda maupun dari Hindia sendiri, berkomitmen untuk memperluas fasilitas pendidikan bagi masyarakat pribumi.<sup>1</sup>

Alasan utama untuk perluasan pendidikan tersebut adalah untuk mengatasi penurunan kesejahteraan masyarakat pribumi dan memenuhi kebutuhan administrasi kolonial yang semakin berkembang di wilayah-wilayah baru di seluruh Hindia-Belanda.<sup>2</sup> Selain itu, meningkatnya permintaan akan tenaga kerja pribumi yang memiliki keahlian Barat juga menjadi faktor penting dalam perluasan pendidikan. Hal ini terutama untuk mengisi posisi tenaga sipil rendah dan menengah di berbagai departemen pemerintahan yang baru didirikan pada saat itu,

---

<sup>1</sup> M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Cetakan ke-1 November 2008 (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta Anggota IKAPI, 2008), Hlm



Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah an Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme (Jilid 2)* urta: Penerbit Ombak, 2018), Hlm 36.

mengingat mengisi berbagai posisi tersebut dengan orang-orang Eropa dianggap terlalu mahal.<sup>3</sup>

Meskipun tujuan pendidikan selama periode kolonial tidak pernah dinyatakan secara jelas tetapi pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja atau buruh bagi kaum pemilik modal Belanda yang diharapkan untuk menjadi tenaga administrasi, tenaga teknik, tenaga pertanian, tenaga kerja kelas dua, juga tenaga kerja kelas bawah (unskilled worker).<sup>4</sup>

Dalam bab ini akan dibahas perkembangan pendidikan di Kota Makassar pada masa Kolonial (Hindia Belanda), masa pendudukan Jepang, dan setelah Kemerdekaan ini menjadi penting karena kedepannya akan menjadi terhubung untuk mengetahui jauh sebelum lahirnya Universitas Sawerigading di Kota Makassar yang merupakan perwujudan dari perjalanan sejarah panjang tentang perkembangan pendidikan terutama perguruan tinggi di Kota Makassar.

## 2.1 Pendidikan Pada Masa Hindia Belanda (Kolonial) tahun 1906-1942

Untuk memahami gambaran jejak-jejak pendidikan di Makassar pada masa kolonial Hindia Belanda ada begitu banyak misalnya, kita perlu melihat kembali ke tahun 1875 awal mula saat Fredrik Matthes tiba di Makassar.<sup>5</sup> Setahun kemudian,

---

<sup>3</sup> Robert Van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Cet.2 (Jakarta: Pustaka Jaya, 2009).

<sup>4</sup> Wardiman Djojonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan* (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1996), Hlm 24.

enjamin Fredrik Matthes merupakan seorang ahli dalam bidang bahasa a di Sulawesi Selatan ia telah mempelajari bahasa Makassar dan Bugis perembat abad atau sekitar 25 tahun. Matthes ditugaskan oleh pemerintah



pada tahun 1876, Mattes mendirikan sebuah sekolah bernama Kwekschool<sup>6</sup> yang biasa disebut dengan sekolah raja yang memperkenalkan sistem pendidikan ala Barat. Pada awalnya, sekolah yang didirikan oleh Matthes dengan tujuan menghasilkan guru-guru namun, mengalami kesulitan dalam mendapatkan murid. Hanya sekitar 20 murid yang berhasil diterima, dan mereka umumnya berasal dari keluarga raja atau kerabat raja yang sebelumnya menerima pendidikan di rumah masing-masing. Hal ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa pada tahun 1876, ketika sekolah ini pertama kali berdiri, hanya ada 16 guru bantu, 16 pengurus pembantu, dan lima juru bahasa. Pada tahun ajaran 1879/1880, jumlah siswa meningkat menjadi 39 orang, dengan tiga guru bantu. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1879 Matthes mengundurkan diri dari pimpinan sekolah tersebut. Sehingga sekolah yang didirikan oleh Mattes kemudian diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Sayangnya, pada tahun 1880, Mattes kembali ke Belanda dan dianugerahi gelar doktor honoris causa pada 28 Januari 1881.

Selain usaha yang dilakukan oleh Freedik Mattes membuat pemerintah Hindia Belanda semakin serius menangani pendidikan di Kota Makassar. Salah satu upaya pemerintah Hindia Belanda adalah mendirikan Europesche Lagere School

---

Belanda untuk datang ke Hindia Belanda dalam rangka membuka sekolah Kwekschool. Lihat pada Sarkawi B. Husain, *Sejarah Sekolah Makassar Di Tengah Kolonialisme, Pertumbuhan Pers, dan Pembentukan Elite Baru (Periode 1876-1942)*, Cetakan Pertama (Makassar: Inninawa, 2015). hlm 74-75



<sup>6</sup> Kwekschool sendiri merupakan sekolah guru yang sudah ada sejak awal 19 dengan masa belajar empat tahun dan menerima lulusan sekolah dasar sebagai pengantar Belanda sekolah ini didirikan oleh Benjamin Freedik Matthes dengan tujuan menyediakan tenaga guru dari kalangan pribumi atau orang-orang asli Makassar. Ibid, Hlm 59

(ELS)<sup>7</sup> atau Sekolah Dasar Eropa. Meskipun sekolah ini pertama kali didirikan di Batavia pada tahun 1817, namun *Europesche Lagere School* pada tahun 1928 hingga tahun 1942, sudah ada empat sekolah ELS yang berdiri di Makassar. Sekolah Dasar Eropa itu diberikan pengantar bahasa Belanda, kemudian batas usia masuk ELS antara 6 -16 tahun, tetapi khusus untuk anak-anak Eropa dan anak-anak dari perkawinan campuran wanita Eropa dengan laki-laki bumiputra dapat masuk ELS sebelum usia 6 tahun, sedangkan anak-anak bumiputra yang akan menjadi murid ELS harus cukup usianya dan diseleksi.

Pada tahun 1820 jumlah sekolah ELS ada 7 buah di Hindia Belanda, tahun 1845 menjadi 24 buah, tahun 1868 menjadi 68 buah, tahun 1883 menjadi 129 buah, dan pada tahun 1898 menjadi 191 buah, dan pada tahun 1917 menjadi 198 buah.<sup>8</sup>

Ini Nampak jelas pada kenaikan jumlah sekolah dan siswa sekolah dasar, dari 1,584 pada tahun 1900 menjadi 21,256 sekolah pada tahun 1940, atau 13 kali lebih besar selama 40 tahun, meskipun terjadi penurunan dari periode 1930-1935 karena

---

<sup>7</sup> *Europesche Lagere School* di Makassar secara literatur belum ada yang spesifik menyebutkan kapan sekolah ini didirikan di Makassar akan tetapi Sekolah Dasar Eropa ini bertempat di Krida atau dalam hal ini Hotel Marannu Jalan Sultan Hasanuddin. Sekolah ini merupakan sekolah pendidikan rendah yang terbagi beberapa tingkatan yang berdasarkan pada kelas sosialnya, untuk anak-anak keturunan Eropa dan anak-anak bumiputra dari golongan priyayi atau elite masuk kedalam kagegori ELS pertama, anak-anak Pribumi atau keturunan Timur masuk kedalam kategori ELS kedua. Ibid. Hlm 62



Djohan Makmur, *Sejarah Pendidikan Indonesia Zaman Penjajahan* Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan dan Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Nasional, 1993), Hlm 77.

adanya krisis dunia. Kenaikan siswa sekolah dasar pada periode yang sama adalah 118,000 menjadi 2,239,000 atau bahkan 20 kali lipat selama 40 tahun.<sup>9</sup>

Memasuki awal abad ke-20, setelah pemerintah Hindia Belanda menaklukkan Sulawesi Selatan pada tahun 1906<sup>10</sup> kembali mendirikan berbagai sekolah khususnya di wilayah Makassar selain Sekolah Dasar Eropa atau *Europesche Lagere School*, terdapat juga Sekolah Kelas Satu, yang biasa disebut *Eerste Klasse*. Sekolah Kelas Satu ini terbagi menjadi dua macam, berdasarkan etnis mereka diantaranya, *Hollandsch Chinesesche School (HCS)*<sup>11</sup> yang didirikan pada tanggal 12 Juli 1908. Sekolah ini terletak di Jalan Timor (*Timor Weg*), sebuah kawasan yang banyak dihuni oleh etnis Tionghoa. Wilayah ini juga dikenal sebagai pusat perdagangan Kota Makassar, mengingat orang Tionghoa pada dasarnya bergerak di bidang perdagangan. HCS menjadi tempat pendidikan bagi anak-anak Tionghoa dengan masa belajar selama tujuh tahun. Tahun 1916, *Hollandsche Chinese School*

---

<sup>9</sup> Djojonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, *Op.Cit*, Hlm 25.

<sup>10</sup> Tahun 1906 merupakan peristiwa penaklukan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai masa pemerintahan Belanda sepenuhnya di Sulawesi Selatan. Belanda melakukan ekspedisi militer dengan menyodorkan pernyataan pendek (*Kotre Verklaring*) kepada Raja-raja untuk menyerahkan kekuasaannya dan patuh terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Sehingga wilayah ini menjadi pemerintahan dan kekuasaan langsung Pemerintah Hindia Belanda. Lihat dalam Edward Poelinggomang L., *Perubahan Politik & Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2020), Hlm 2.



Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, dan Heri Kusuma Tarupay, dan *Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an*, ed. oleh awa, (Yogyakarta: PT Kansisus, 2014).” Sekolah Cina Dan Identitas na di Makassar”, Hlm 115

(HCS) mencatatkan jumlah murid sebanyak 290 orang. Dari jumlah tersebut, 271 adalah murid laki-laki dan 19 adalah murid perempuan. Pada tahun 1920 sekolah ini Kembali didirikan dengan murid sebanyak 33 orang. Sekolah ini menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada sore hari. Menjelang akhir tahun 1927, sekolah ini memiliki 66 siswa, yang terdiri dari 8 siswa Eropa dan 58 siswa Timur Asing

Di sisi lain, pada tahun 1907, pemerintah Belanda juga mendirikan Hollandsche Ambonsche School (H.A.S)<sup>12</sup> atau sikola Ambong di Tabaringan. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak Ambon. Letaknya yang strategis di kawasan Tabaringan.

Selain Hollandsch Chineesche School (HCS) dan Hollandsche Ambonsche School, ada juga Hollandsch Inlandsche School (HIS)<sup>13</sup> yang termasuk dalam kategori Sekolah Kelas Satu (Eerste Klasse). HIS didirikan pada tahun 1914 untuk Wilayah Hindia Belanda sedangkan pada tahun 1916 baru didirikan di Makassar

---

<sup>12</sup> Hollandsche Ambonsche School merupakan sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1907 atas membalas jasa dari orang-orang ambon karena telah membantu Pemerintah Belanda dalam menguasai Sulawesi Selatan. Lihat dalam Sarita Pawiloy, Intan Densi Kamar, dan Rauf A. Rahim, *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan*, ed. Oleh Mardanas Safwan dan Sutrisno Kutoyo (Ujung Pandang: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan daerah, 1980), Hlm 55.

<sup>13</sup> HIS (Hollandsche Inlandsche School) sekolah yang diperuntukkan bagi golongan penduduk keturunan Indonesia asli yang pada umumnya disediakan untuk anak-anak dari golongan bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka, atau pegawai negeri. Sekolah ini memberikan kesempatan bagi anak-anak bumiputra untuk menjalankan pendidikan di sekolah rendah kelas satu bersama dengan anak-anak Belanda lainnya. *Sejarah Pendidikan Indonesia Zaman Penjajahan*, Hlm 77.



dan khusus diperuntukkan bagi pribumi atau Bumi Putera. Sekolah ini berlokasi di Jalan Sungai Tangka, sekitar 3 kilometer dari Benteng Fort Rotterdam. Sekolah ini menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Kurikulumnya mencakup berbagai mata pelajaran yang diajarkan dalam bahasa Belanda, dengan ini maka terbukalah kesempatan bagi suku Bugis Makassar dan suku lainnya yang bumi putera untuk mempelajari bahasa Belanda. Tammatan H.I.S. dipersiapkan untuk pendidikan lanjutan. H.I.S. memegang peranan utamanya untuk masuk MULO, berhubung penguasa bahasa Belanda di sekolah itu agak memadai. Dan juga, H.I.S. mempunyai lama pendidikan 7 tahun.<sup>14</sup>

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Joannes Benedictus van Heutsz, pada tahun 1907, pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan sebuah sistem pendidikan kolonial melalui pendirian Sekolah Desa (Volkschool). Tujuan utama pendirian sekolah ini adalah untuk menyediakan standar pendidikan yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh masyarakat desa.<sup>15</sup> Volkschool merupakan dasar penting dalam implementasi pendidikan berbasis lokal, di mana bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa daerah setempat.

---

<sup>14</sup> Husain, *Sejarah Sekolah Makassar Di Tengah Kolonialisme, Pertumbuhan dan Pembentukan Elite Baru (Periode 1876-1942)*, Op.Cit Hlm 68.

<sup>15</sup> Christiaan Lambert Maria Penders, *Colonial Education Policy and Practice in Indonesia 1900-1942*, Thesis (Australia: Australian National University, 1968),



Namun, upaya pemerintah Hindia Belanda dalam memperluas akses pendidikan tidak berhenti pada pendirian *Volkschool*. Pada tahun 1915, mereka mendirikan sekolah lanjutan yang dikenal dengan nama *Vervolgschool*.<sup>16</sup>

*Vervolgschool* berfungsi sebagai kelanjutan dari pendidikan dasar yang diberikan di *Volkschool*. Sekolah ini dirancang untuk memberikan pendidikan yang lebih lanjut dengan, masa pendidikan *Vervolgschool* sampai pada kelas 4-5, *Volkschool* hanya sampai pada kelas 3. Dengan demikian masa pendidikan *Volkschool* selama 3 tahun, kemudian dilanjutkan dengan *Vervolgschool* dengan 2 tahun masa belajar.<sup>17</sup> Dari segi kurikulum pun sangat sederhana karena hanya mata pelajaran baca, tulis dan berhitung yang diajarkan.

Selain, pendirian *Volkschool* yang telah dijabarkan diatas, Pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan sekolah *Inlands School*. *Inlandsche School* pada awalnya disebut *Gouvernement School*, yang didirikan pada tahun 1904 di *Butung Weg*, yang kini dikenal sebagai *Jalan Butung* di bagian sebelah utara kota Makassar. Masyarakat setempat biasa disebut sebagai Sekolah Melayu. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan pendidikan, sekolah serupa juga didirikan di *Jalan Amanagappa*, tepatnya di kawasan *Karebosi* di bagian selatan Makassar dan pada tahun 1910 sekolah ini dibangun lagi yang ketiga kalinya di *Jongaya* dan



---

<sup>16</sup> Alifia Nurhusna Afandi, dkk, "Pendidikan Pada masa Pemerintah Kolonial Belanda Tahun 1900-1930," *Jurnal Artefak* 7, no. 1 (2020): Hlm 27.

Iusain, *Sejarah Sekolah Makassar Di Tengah Kolonialisme, Pertumbuhan dan Pembentukan Elite Baru (Periode 1876-1942)*, Op.Cit Hlm 57.

Limbang.<sup>18</sup> Pada tahun 1905, nama Gouvernemen School diubah menjadi Inlandsche School.

Pada tahun 1904 hingga 1910, Pemerintah Hindia Belanda mengelola dua jenis pendidikan formal, yaitu *Volkschool* dan *Inlands School*. Data mencatat bahwa pada tahun 1910 terdapat 27 sekolah *Inlandsche School* dan 95 sekolah *Volkschool* di Sulawesi Selatan. Kedua jenis sekolah ini menawarkan pendidikan dasar dengan masa belajar dari kelas 1 hingga kelas 4. Meskipun keduanya memberikan pendidikan dasar, lulusan *Volkschool* dan *Inlandsche School* belum bisa langsung melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat menengah seperti MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*). Untuk dapat masuk ke MULO, mereka terlebih dahulu harus mengikuti kelas persiapan (*Voorklas*) selama dua tahun. Baru setelah menyelesaikan *Voorklas*, mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka di MULO.<sup>19</sup>

MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*)<sup>20</sup> sekolah ini merupakan salah satu institusi baru atau kalau yang kita sekarang kenal setara dengan tingkat SMP sekolah MULO ini berfungsi untuk menampung lulusan HIS (*Hollandsch-*

---

<sup>18</sup> Ibid, Hlm 69.

<sup>19</sup> Pawiloy, Densi Kamar, dan Rahim, *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan*, Op.Cit Hlm 58-59.

<sup>20</sup> MULO merupakan sekolah serupa dengan sekolah menengah pertama dengan masa belajar 3 tahun dan dapat menjadi 6 tahun apabila melalui *Voorklas*. Ini mengajarkan bahasa asing sehingga lulusan dari MULO dapat berbahasa Belanda, Jerman, Inggris, Prancis yang kemudian bisa melanjutkan pendidikan selanjutnya ke AMS di Batavia. Lihat dalam Prof. Dr. ..., *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), Hlm 80.



Inlandsche School) dengan status tertinggi saat itu dan diawasi langsung oleh Asisten Residen. Sekolah MULO didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1914 di Bandung.<sup>21</sup> Namun, menurut buku Sejarah Sosial Sulawesi Selatan, MULO di Makassar didirikan pada tahun 1920. Sarkawi B. Husein, dengan referensi kolonial, menyatakan bahwa pada tahun 1919 sudah ada laporan yang menunjukkan bahwa MULO di Makassar telah memiliki murid sebelum tahun 1920, dengan jumlah 42 dan 49 siswa.<sup>22</sup>

MULO adalah sekolah umum, dan lulusannya dapat melanjutkan pendidikan ke AMS (Algemene Middelbare School) di Batavia. Untuk bisa belajar di MULO, seorang siswa harus lulus dari HIS, HAS (Hollandsche Ambonsche School untuk anak-anak suku Ambon), atau HCS (Hollandsche Chinese School untuk anak-anak Tionghoa). Beberapa murid terkenal, seperti Andi Makkulau, putra Datu Luwu, dan Andi Jemma, juga belajar di MULO di Makassar.<sup>23</sup>

Beberapa sekolah umum yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda telah dijelaskan sebelumnya, namun ada satu yang juga penting yaitu Sekolah Kejuruan. Sekolah kejuruan ini dikenal dengan nama OSVIA (Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren), yang berfungsi untuk mendidik calon pegawai

---

<sup>21</sup> Ibid, Hlm 122.

<sup>22</sup> Husain, *Sejarah Sekolah Makassar Di Tengah Kolonialisme, Pertumbuhan Pers, dan Pembentukan Elite Baru (Periode 1876-1942)*, Op.Cit, Hlm 72.



Muchlis Paeni, *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan Mobilitas Sosial kassar 1900-1950* (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan at Jendral Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek sasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984), Hlm 121.

bumiputra yang nantinya akan menjadi birokrat pemerintah di berbagai dinas. Awalnya, sekolah ini dikenal sebagai Hoofdenscholen pada masa awal penerapan politik etis di bawah kepemimpinan J.H. Abendanon, kemudian pada tahun 1900 namanya berubah menjadi OSVIA. Khususnya di Makassar, OSVIA didirikan pada tanggal 17 Oktober 1910.<sup>24</sup>

Pada masa-masa awal pendiriannya, selain mempersiapkan tenaga kerja untuk dinas pemerintah, OSVIA juga bertugas mendidik tenaga guru untuk sekolah umum pribumi. Masa studi di sekolah ini adalah 6 tahun, dan sekolah ini menerima lulusan dari sekolah dasar berbahasa Belanda seperti ELS, serta mulai menerima lulusan dari MULO pada tahun 1927.

Untuk dapat memasuki sekolah OSVIA, calon siswa harus menunjukkan surat keterangan keturunan atau silsilah yang membuktikan ia berasal dari kalangan bangsawan, keluarga Ambtenar, atau seorang Bumiputra yang setia kepada pemerintah Hindia Belanda. Sistem ini juga diterapkan di sekolah-sekolah elit lainnya seperti MULO dan AMS. Sekolah OSVIA dikelola langsung oleh residen Sulawesi, yang juga bertanggung jawab atas penerimaan dan penamatan murid, termasuk penandatangananannya.<sup>25</sup>

Surat keterangan ini diserahkan kepada Pengawas Pendidikan Pribumi (Pecteur Inlands Onderwijs). Sekolah OSVIA tidak hanya menerima murid dari



---

<sup>24</sup> Yusain, *Sejarah Sekolah Makassar Di Tengah Kolonialisme, Pertumbuhan dan Pembentukan Elite Baru (Periode 1876-1942)*, Op.Cit Hlm 76-77.

<sup>25</sup> Pawiloy, Densi Kamar, dan Rahim, *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi* Op.Cit Hlm 120.

Sulawesi Selatan, tetapi juga dari Kalimantan Selatan, Timor Timur, Manado, dan Ternate. Di sekolah ini, para siswa mempelajari Bahasa Belanda, Bahasa Melayu, Bahasa Bugis, Bahasa Makassar, Geografi, Sejarah, Matematika, dan Menulis Indah. Bagi yang memilih jalur calon pegawai, mereka juga belajar Prinsip-Prinsip Agraris, Ilmu Ekonomi Negara, Prinsip-Prinsip Administrasi Negara dan Hukum, Ilmu Hukum, serta Ilmu Ekonomi Pertanian. Pada tahun ajaran 1933/1934, sekolah OSVIA dihapuskan dan digabungkan dengan sekolah MULO.<sup>26</sup> Tidak ada kejelasan mengapa OSVIA ini dihapuskan dan kemudian dsatukan dengan sekolah MULO kurangnya literatur yang membahas alasan tersebut.

Meski banyak sekolah yang belum diungkapkan oleh penulis, yang terpenting adalah bahwa lembaga pendidikan di Makassar telah muncul jauh sebelum pendidikan dasar dikenal. Dimulai dari Kwekschool pada tahun 1876, perhatian besar terhadap pendidikan di Makassar mulai berkembang dengan berdirinya berbagai sekolah dasar seperti ELS, HCS, HIS, HAS, dan Volksschool. Sekolah lanjutan seperti Gouvernment School dan Vervolgschool, serta pendidikan menengah seperti MULO dan OSVIA, juga didirikan untuk mempersiapkan murid memasuki birokrasi pemerintahan Hindia Belanda.

## 2.2 Pendidikan Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945

Peralihan dari masa kolonial Belanda ke masa pendudukan Jepang merupakan babak baru dalam sejarah Indonesia. Meskipun ada perbedaan cara



---

Iusain, *Sejarah Sekolah Makassar Di Tengah Kolonialisme, Pertumbuhan dan Pembentukan Elite Baru (Periode 1876-1942)*, Op.Cit Hlm 81.

antara Belanda dan Jepang, keduanya meninggalkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Jepang dengan mudah merebut Indonesia dari Belanda, mengambil alih tempat-tempat strategis di seluruh Indonesia satu per satu.

Sejak kedatangan Jepang pada bulan Februari 1942, beberapa tokoh di Makassar melihat kekalahan tentara Belanda sebagai tanda bahwa Jepang adalah pembebas yang mengakhiri pengaruh Kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Perlawanan Belanda terhadap Jepang berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Kalijati pada 9 Maret 1942. Penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal H. Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda, kepada tentara Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura menandai berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda dan dimulainya masa pendudukan Jepang di Indonesia.<sup>27</sup>

Setelah tahun 1942, Jepang mulai merumuskan kebijakan terhadap rakyat Indonesia. Salah satu kebijakan awal di bidang pendidikan adalah menanamkan budaya Jepang kepada masyarakat. Jepang membentuk sebuah lembaga bernama Keimin Bunkha Shidôsho atau Pusat Kebudayaan, yang bertugas memperkenalkan dan menyebarkan kebudayaan Jepang. Mereka juga mendidik dan melatih masyarakat untuk menyanyikan Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang, serta



---

Muhammad Rijal Fadli dan Dyah Kumalasari, “Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang,” *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, dan Pengajarannya* 13, no. 2 (31 Desember 2019): Hlm 190.

mengibarkan bendera Jepang. Ini adalah salah satu upaya Jepang dalam menyebarkan budayanya di Indonesia.<sup>28</sup>

Pada bulan Mei tahun 1942, Jepang mulai mengubah sistem pendidikan yang sebelumnya dipengaruhi oleh kolonial Belanda. Salah satu perubahan signifikan adalah pada tingkat pendidikan dasar, yang sebelumnya dikenal sebagai *Volkschool*. Jepang mengubah nama sekolah ini menjadi *Futsu Ko Gakko* dan menambahkan mata pelajaran bahasa Jepang sebagai mata pelajaran wajib bagi seluruh murid. Sekolah ini juga menerapkan upacara wajib yang harus dilaksanakan sebelum pelajaran dimulai.<sup>29</sup>

Selain itu, Jepang mewajibkan setiap murid untuk melakukan gerak badan, seperti gerak jalan, dengan tujuan meningkatkan kedisiplinan siswa. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai implementasi untuk mengarahkan sistem pendidikan ke arah militerisasi secara tidak langsung sesuai dengan sistem Jepang.

Tidak hanya pada tingkat dasar, perubahan nama juga terjadi pada sekolah-sekolah lanjutan. Sekolah lanjutan dari *Volkschool* yang sebelumnya disebut dengan *Volkschool* kini diganti namanya menjadi *Kogio Ko Gakko*. Sekolah yang khusus untuk mendidik calon guru, yang sebelumnya dikenal sebagai sekolah guru, kini berubah namanya menjadi *Kio In Yoseijo*. Sementara itu, pada tingkatan

---

<sup>28</sup> Hudaidah Hudaidah dan M Arman Putra Karwana, "Pendidikan di Indonesia Masa Pendudukan Jepang," *Danadyaksa Historica* 1, no. 2 (31 Januari 2013), hlm 99.

<sup>29</sup> Pawiloy, Densi Kamar, dan Rahim, *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan*, Op.Cit Hlm 100.



menengah, sekolah MULO yang ada pada masa kolonial Belanda kini berganti nama menjadi Cu Gakko.<sup>30</sup>

Perubahan-perubahan ini menunjukkan bagaimana Jepang berusaha menanamkan sistem pendidikan, dengan memperkenalkan budaya mereka melalui perubahan nama sekolah dan penambahan mata pelajaran bahasa Jepang.

Semenjak kependudukan Jepang di Sulawesi Selatan tak hanya pendidikan formal yang diberi tekanan bahkan sekolah keagamaan juga pun ikut diawasi oleh pemerintah Jepang khususnya pada pendirian pendidikan islam yang didirikan oleh Haji Umar Faizal yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh jepang bahkan guru-guru ditahan apalagi guru yang berkebangsaan belanda dituduh dan dianggap sebagai mata-mata sehingga ada sekolah yang harus ditutup.

### **2.3 Pendidikan Pada Masa Kemerdekaan Tahun 1945-1965**

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sehari setelah kemerdekaan, Dr. G.S.S.J. Ratulangi ditunjuk sebagai gubernur Sulawesi. Pada 19 Agustus 1945, Ratulangi tiba di Makassar.<sup>31</sup> Langkah pertama yang dilakukan Ratulangi setibanya di Makassar adalah mengumumkan secara resmi proklamasi kemerdekaan kepada para pemuka rakyat Sulawesi. Langkah

---

<sup>30</sup> Ibid Hlm 102.



Masjkuri, *Dr. Gssj. Ratulangi* (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan aan Direktorat Jendral Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai al Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1985), Hlm

kedua, Ratulangi mulai membentuk pemerintahan dengan menghimpun kekuatan sosial di Sulawesi.<sup>32</sup>

Di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi, Ratulangi, beberapa tokoh di Makassar memiliki semangat besar untuk memajukan pendidikan, khususnya di Sulawesi Selatan. Hal ini mengakibatkan berdirinya dua sekolah, salah satunya adalah Perguruan Datu Museng yang didirikan pada 1 Oktober 1945 yang terletak di dekat Pantai Losari 1 Km dari Benteng Fort Rotterdam.

Haji Mansyur Daeng Tompo, Haji Darwis Zakariah, Haji Gazali Sachlan, dan Luthan Muhammad, yang merupakan anggota dari Persatuan Islam, salah satu pendiri Perguruan Datu Museng, memiliki keinginan untuk mendirikan sekolah bernuansa Islam setelah kemerdekaan. Semangatnya dalam mendirikan sekolah ini merupakan reaksi terhadap penjajah yang mengabaikan pendidikan Islam. Selain itu, ia ingin menyediakan tempat bagi para pejuang muda yang ingin meningkatkan pendidikan mereka di Sulawesi.<sup>33</sup>

Perguruan Datu Museng didirikan berdasarkan keinginan kuat beberapa tokoh, termasuk Haji Mansyur Daeng Tompo, Haji Darwis Zakariah, Haji Gazali Sachlan, dan Luthan Muhammad, yang merupakan anggota dari organisasi Islam yaitu Persatuan Islam. Mereka ini juga berperan sebagai pendiri sekolah tersebut.



---

<sup>32</sup> Zainuddin Taha, *Sulawesi 1940-1960 Dari Ratulangi ke Andi Pangerangi* (Makassar: Pusaka Almaida, 2021), Hlm 11.

<sup>33</sup> Paeni, *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan Mobilitas Sosial Kota Makassar 1900-1950, Op.Cit* Hlm 148.

Sekolah ini terdiri dari dua jenjang pendidikan, yaitu tingkat dasar dan tingkat menengah, yang mulai dibuka pada tahun 1949.<sup>34</sup>

Masing-masing jenjang memiliki kurikulum yang mencakup pelajaran umum dan pelajaran agama, dengan proporsi 65% untuk pelajaran umum dan 35% untuk pelajaran agama. Pada pagi hari, kelas diisi oleh siswa pendidikan dasar, sementara pada sore hari, siswa pendidikan menengah mengikuti pelajaran.<sup>35</sup>

Sekolah lainnya yang didirikan adalah Perguruan Nasional pada 8 Oktober 1945. Awalnya, ketika Gubernur Ratulangi mengumpulkan rakyat Sulawesi Selatan untuk membentuk pemerintahan di wilayah tersebut, sejumlah pemuda terpelajar berkumpul di rumah Ratulangi. Mereka mendiskusikan masalah kemerdekaan. Tokoh-tokoh seperti Rivai Perai, Rachman Lanto, Emmy Saelan, Milly Ratulangi, dan Elly Saelan, yang dulunya bersekolah di Jepang, mendesak Gubernur Ratulangi untuk mendirikan sekolah setelah kemerdekaan, yang nantinya dinamakan Sekolah Nasional.<sup>36</sup>

Desakan ini mendorong Gubernur Ratulangi untuk mengambil tindakan. Bersama dengan Lanto Dg. Pasewang, Josef Latumahina, Saleh Daeng Tompo, IPL Tobing, Sowewarno, dan W.S.T. Pondang, ia mendirikan Yayasan Wakaf Merdeka

---

<sup>34</sup> Pawiloy, Densi Kamar, dan Rahim, *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan*, Op.Cit Hlm 107.



<sup>35</sup> Paeni, *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan Mobilitas Sosial Kota 1900-1950*, Op.Cit Hlm 149.

Bisma A. Mukdan, *Menelusuri Anggaran Dasar Perguruan Nasional Sejak 1945* (Pondang: Yayasan Wakaf Merdeka, 1998), Hlm 5.

dan mendirikan Sekolah SMP Nasional pada 8 Oktober 1945. Setahun kemudian, pada 14 Januari 1946, mereka membuka Sekolah Rakyat Nasional (SR).<sup>37</sup>

Pada tahun 1946, Belanda berusaha kembali menguasai Kawasan Timur Indonesia, khususnya di Makassar. Akibatnya, Ratulangi dan beberapa tokoh pemerintahan lainnya ditangkap dan diasingkan ke Serui, Papua Barat.<sup>38</sup> Kemudian, pada tahun 1948, ketika Ibu Weledah Maladjong menggantikan Dr. Ratulangi sebagai direktur SMP Nasional, ia berinisiatif untuk membangun gedung sekolah bersama Nyona Towoliu dan Mukdan. Mereka berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp65.000 (jumlah yang cukup besar pada waktu itu). Di atas tanah yang diwakafkan oleh seorang nasionalis bernama Hamid Dg Tobo di Jalan Dr. Ratulangi No. 84, mereka mendirikan gedung sekolah untuk SMP Nasional.<sup>39</sup>

Sekolah Perguruan Nasional kemudian mendirikan SMA Nasional pada 1 Juli 1948 dan membuka SMK Nasional pada 1 Juli 1962. Beberapa murid SMP Nasional antara lain A. Gani Tahir, Nur Nawawi, Muhammad, Henny Katili, Daniel Usmani, Makkateru Sj., A. Hamid Empo, Sahabuddin P., Yakub Samuli, Budoyo,

---

<sup>37</sup> Halimah Dg. Sikati, *Kenangan Alumni Perguruan Nasional Tahun Pelajaran 2005-2006* (Makassar: Yayasan Wakaf Merdeka, 2006), Hlm 4.

<sup>38</sup> Mukdan, *Menelusuri Anggaran Dasar Perguruan Nasional Sejak 1945*, lm 7.

Sikati, *Kenangan Alumni Perguruan Nasional Tahun Pelajaran 2005-2006*. Cit Hlm 6.



Budihardjo, Aminuddin Ressang, Andi Soko, A. Rahim, Ali Walangadi, Nurdin Salam, Ida Saellan, Soesilah, M. Dahlan, Winarmo Surachmad, dan Mukdan.<sup>40</sup>

Memasuki tahun 1948, pada masa pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT), pendidikan mulai mengalami perkembangan dengan adanya niatan pemerintah untuk membangun sebuah perguruan tinggi. Namun sebelum itu mengingat bahwa sebelum kemerdekaan, khususnya pada masa Pemerintah Hindia Belanda, pendidikan tinggi di Makassar hanya ada MULO, sedangkan pada masa penjajahan Jepang adalah Tokobetsu cu Gakko. Situasi ini mendorong pemerintah NIT untuk mendirikan pendidikan tinggi.<sup>41</sup>

Usaha pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT) yang dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Hubertus Johannes Van Mook terbukti dengan dikeluarkannya keputusan untuk mendirikan perguruan tinggi pada 23 Juli 1947. Perguruan tinggi ini diberi nama Fakultas Ekonomi. Pendirian ini terinspirasi oleh Universitas Indonesia yang didirikan pada masa NICA (Netherlands Indies Civil Administration) di Batavia, yang kini dikenal sebagai Jakarta. Selain di Makassar, beberapa cabang dari Universitas Indonesia juga tersebar di berbagai daerah, termasuk Fakultas Ekonomi yang berada di Makassar.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Mukdan, *Menelusuri Anggaran Dasar Perguruan Nasional Sejak 1945*, Op.Cit Hlm 8.

<sup>41</sup> Pawiloy, Densi Kamar, dan Rahim, *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan*, Op.Cit Hlm 118.

Amrullah Amir, *Sejarah Berdirinya Universitas Hasanuddin*, Cetakan 1, alis Universitas Hasanuddin (Makassar: Innawa bekerjasama dengan Kedokteran Universitas Hasanuddin, 2021), Hlm 4.



**Gambar 1.1** Peresmian Pembukaan Fakultas Ekonomi di Makassar



*Peresmian Pembukaan Fakultas Ekonomi di Makassar.*

Sumber : Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Sulawesi* (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953)

Pemerintah NIT menugaskan Drs. L.A.H. Enthoven untuk memimpin dan mengurus Fakultas Ekonomi tersebut pada 1 September 1947. Pada 15 Januari 1948, kegiatan perkuliahan resmi dimulai dengan 16 mahasiswa, terdiri dari 13 laki-laki dan 3 perempuan; 8 mahasiswa berasal dari Indonesia, 6 dari Tionghoa, dan 2 dari Belanda. Fakultas ini juga didukung oleh 8 pengajar. Awalnya, perkuliahan masih berupa kursus dengan pelatihan Guru Ilmu Ekonomi. Pada 1 Februari 1948, Prof. Dr. J.J. Honrath diangkat menjadi guru besar dalam bidang Ilmu Ekonomi, Statistik, dan Ilmu Bumi Perekonomian.



Gambar 1. 2 Peresmian Pembukaan Fakultheit Ekonomi di Makassar



*Pengresmian Pembukaan Fakultas Ekonomi di Makassar.*

Sumber : Sjariff Saleh, *Memperkenalkan Sulawesi* (Makassar: Djawatan Penerangan Propinsi Sulawesi, 1955)

Perkembangan Fakultas Ekonomi ini berlangsung cepat. Dari yang awalnya hanya berupa kursus, fakultas ini berkembang menjadi institusi pendidikan yang berdiri di atas tanah yang berada di Kampung Barayya, lorong 107, dan resmi dibuka pada 8 Oktober 1948. Dibawah kepemimpinan Prof. Dr. J.J. Honrath, fakultas ini mengalami kemajuan pesat dengan jumlah mahasiswa mencapai 36 orang dan 11 pengajar. Pada tahun 1949, jumlah mahasiswa bertambah menjadi 77 orang.<sup>43</sup>



---

jariff Saleh, *Memperkenalkan Sulawesi* (Makassar: Djawatan Penerangan Sulawesi, 1955), Hlm 293.

Gambar 1.3 Pelantikan Maha Guru Universitas Indonesia Cabang Makassar yang dibacakan oleh Prof. Dr. Bahder Djohan



Sumber : Sjariff Saleh, *Memperkenalkan Sulawesi* (Makassar: Djawatan Penerangan Propinsi Sulawesi, 1955)

Selain itu, pada akhir tahun 1951, Nurdin Syahadat, Mr. Tjia Kok Tjiang, dan Drs. G.J. Wolhoff mendirikan Yayasan Balai Perguruan Tinggi Sawerigading dengan resmi di hadapan notaris di Makassar.<sup>44</sup>

Gambar 1.4 Pembukaan Fakultas Hukum dan pengetahuan Masyarakat Tahun 1951 di Makassar



Sumber : Kementrian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Sulawesi* (Jakarta: Kementrian Penerangan, 1953)



---

bid, Hlm 295.

Setahun kemudian, pada Oktober 1951, Sdr. J.E. Tatengkeng melakukan upaya untuk mendirikan Fakultas Hukum sebagai bagian dari usaha membentuk universitas yang lengkap di Makassar. Berdasarkan surat dari Gubernur Sulawesi yang diumumkan pada Februari 1952, Fakultas Hukum dibuka secara resmi dengan persyaratan bahwa lulusan OSVIA dan sekolah menengah dapat langsung diterima.<sup>45</sup> Sejak tahun 1952, terdapat tiga universitas di Makassar: Fakultas Ekonomi yang didirikan sejak 1947, Universitas Sawerigading yang didirikan pada tahun 1951, dan upaya pendirian Fakultas Hukum pada tahun 1951.

Gambar 1.5 Pembukaan Fakultas Hukum dan pengetahuan Masyarakat Tahun 1951 di Makassar



Sumber : Sjariff Saleh, *Memperkenalkan Sulawesi* (Makassar: Djawatan Penerangan Propinsi Sulawesi, 1955)

Pada tahun 1954, tepatnya pada 22 Syawal 1373 Hijriah atau 23 Juni 1954, Universitas Muslim didirikan.<sup>46</sup> Ini berawal ketika Nazaruddin Rahmat ditugaskan

---

<sup>45</sup> Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Kota Madya Ujung Pandang 1926-1988 :, “an. Gubernur Sulawesi Bagian Pemerintahan Umum: Surat tanggal 31 Desember 1951 tentang pembukaan Fakultas Hukum Negeri di Makassar”.



Nurman Said, *Sinergi Agama dan Sains : Ikhtiar Membangun Pusat in Islam* (Makassar: Alauddin press, 2006), Hlm 16 Lihat juga dalam leh, *Memperkenalkan Sulawesi, Op.Cit* Hlm 301.

ke Makassar oleh K.H. Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama RI pada tahun 1951. Sesampainya di Makassar pada 9 Mei 1952, Nazaruddin Rahmat bertemu dengan tokoh-tokoh penting di Sulawesi Selatan yang menginginkan adanya Universitas Islam di Makassar.<sup>47</sup>

Gambar 1.6 Sambutan Mr. Tjia Kok Tijang di hari Pembukaan Universitas Muslim Indonesia di Makassar Tahun 1954



Sumber : Sjariff Saleh, *Memperkenalkan Sulawesi* (Makassar: Djawatan Penerangan Propinsi Sulawesi, 1955)

Pada tanggal 28 Januari 1956, dimulai persiapan untuk mendirikan Fakultas Kedokteran Makassar dengan ketua panitia Sjamsuddin Daeng Mangawing. Pada 9 September 1956, Fakultas Kedokteran Makassar secara resmi dibuka dan kemudian menjadi bagian dari Universitas Hasanuddin. Dekan pertama fakultas ini adalah Prof. dr. R. Soegiono Djoened Poesponegoro, dengan 17 tenaga pengajar dan 65 mahasiswa.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Anna Asriani Muchlis, *Kampus Hijau Di Tengah Perubahan Zaman : Universitas Muslim Indonesia 1954-1965*, (Skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2013), Hlm 68.



<sup>48</sup> Amrullah Amir, *Sejarah Berdirinya Universitas Hasanuddin*, Op.Cit Hlm

Gambar 1.7 Prof. Dr. Bahder Djohan melihat-lihat pembangunan Fakultas kedokteran di Makassar Pada Januari 1956



Sumber : Sjariff Saleh, *Memperkenalkan Sulawesi* (Makassar: Djawatan Penerangan Propinsi Sulawesi, 1955)

Universitas Hasanuddin secara resmi didirikan pada 10 September 1956, menggabungkan beberapa fakultas yang telah didirikan oleh pemerintah, seperti Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Kedokteran. Pembukaan universitas ini memenuhi persyaratan untuk mendirikan universitas negeri di Makassar. Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan tertanggal 11 Juni 1956 No.33696/S, yang menetapkan bahwa Universitas Hasanuddin mulai beroperasi pada 10 September 1956.



Gambar 1.8 Wakil Presiden Moh. Hatta Meresmikan berdirinya Universitas Hasanuddin pada tanggal 10 September 1956



Sumber : Amrullah Amir, *Sejarah Berdirinya Universitas Hasanuddin*, Cetakan 1, Dies Natalis Universitas Hasanuddin (Makassar: Innawa bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, 2021).

Wakil Presiden RI Mohammad Hatta meresmikan pembukaannya. Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo ditunjuk sebagai presiden universitas sementara, selain menjabat sebagai Rektor/Presiden Universitas Airlangga di Surabaya selama tahun 1956-1957. Kemudian pada tahun 10 September 1956 berdirinya Universitas Hasanuddin dan diresmikan oleh Wakil Presiden pertama Drs. Moh. Hatta.<sup>49</sup>

Beberapa tahun setelah Universitas Hasanuddin didirikan, tokoh-tokoh di UMI (Universitas Muslim Indonesia) di Makassar mulai merencanakan pendirian pendidikan tinggi Islam Negeri. Gagasan ini disampaikan oleh H. Abd. Rahman Syihab kepada Badan Wakaf UMI yang dipimpin oleh Andi Pangerang Petta Rani. Pada Januari 1962, Badan Wakaf UMI mengadakan rapat untuk membahas



---

<sup>49</sup>Awiloy, Densi Kamar, dan Rahim, *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi* Op.Cit Hlm 120. Lihat juga dalam Amrullah Amir, *Sejarah Berdirinya as Hasanuddin*, Op.Cit Hlm19.

pendirian IAIN di Makassar. Gagasan ini mendapat dukungan, dan H. Abd. Rahman Syihab menghubungi Gubernur Sulawesi Selatan dan Tenggara, Andi Achmad Rifai.<sup>50</sup>

Setelah persetujuan Menteri Agama, SK nomor 7 tahun 1962 tentang pembukaan IAIN Makassar diterbitkan. IAIN Makassar resmi berdiri pada 10 November 1962. Awalnya, IAIN Makassar adalah Fakultas Syariah dari UMI yang kemudian berdiri sendiri pada 14 April 1965, Gubernur mengeluarkan surat rekomendasi untuk mendirikan IAIN dengan nama Alauddin.<sup>51</sup> Berdasarkan keputusan Menteri Agama pada 10 November 1965. Kemudian K.H. Ali Yafi dilantik sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Haji Aroeppala sebagai Rektor baru IAIN Alauddin.<sup>52</sup>

Dengan demikian, dari periode NIT pada tahun 1947 hingga tahun 1965, terdapat fenomena menggambarkan usaha masyarakat untuk mendirikan perguruan tinggi secara khusus, antara tahun 1951 hingga 1965, sangatlah nampak pertumbuhan beberapa Universitas di Makassar yang kini ditahun 1965 memiliki dua universitas negeri dan dua universitas swasta. Penulis akan memfokuskan

---

<sup>50</sup> Said, *Sinergi Agama dan Sains : Ikhtiar Membangun Pusat Peradaban Islam*, Hlm 16.

<sup>51</sup> Ummul Hair, "Peranan H. M. Saleh A. Putuhena Dalam Pengembangan IAIN Alauddin Makassar" (Skripsi, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin ; 2019), Hlm 44, (Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Alauddin).



I. Abd. Rahim Yunus, *30 Tahun IAIN Alauddin* (Ujung Pandang: Balai IAIN Alauddin, 1996), Hlm 25.

pembahasan pada Universitas Sawerigading, sebagai universitas swasta pertama di Makassar, yang akan diulas lebih mendalam di bab selanjutnya.





Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)